

Metro Kendari

# Hari Pengayoman ke-79, Kanwil Kemenkumham Sultra Laksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis



DetikSultra • 1 Agustus 2024

236

Share

Facebook

X

Share via Email



Kanwil Kemenkumham Sultra laksanakan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka memperingati hari pengayoman ke-79. Foto: istimewa

Dengarkan

**KENDARI, DETIKSULTRA.COM**– Memperingati Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan yakni konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di ruang layanan Kanwil Kemenkumham Sultra, Rabu (31/07/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu rangkaian kegiatan memperingati Hari Pengayoman ke-79 dan dilaksanakan sebagai wujud bakti sosial Kemenkumham kepada jajaran Kemenkumham untuk mengetahui kondisi kesehatan jajarannya.

"Semoga pemeriksaan kesehatan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Kemenkumham Sultra untuk mengetahui kondisi kesehatan, dimana dengan badan yang sehat dapat meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terlebih dalam waktu dekat kita akan menyambut Hari Pengayoman ke-79," ucapnya.

Salah satu pegawai yang mengikuti kegiatan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis ini mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi seluruh jajaran, terlebih lagi tidak semua pegawai memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan dirinya sendiri.

Serta kegiatan pemeriksaan Kesehatan ini tidak hanya melibatkan jajaran pegawai namun ada juga masyarakat umum yang sedang dalam melakukan pelayanan di Kanwil Kemenkumham Sultra.

Pemeriksaan Kesehatan gratis ini juga diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat Yasin serta Pejabat Administrator dan Pengawas serta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, akan diketahui kondisi dari jajaran pegawai untuk mendapatkan rekomendasi dari tim dokter atas hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan yang disediakan diantaranya tensi darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol.(kjs)

Metro Kendari

# Kemenkumham Sultra Gelar Legal Expo, Wujud Pelayanan Optimal



DetikSultra • 4 Agustus 2024

237

Share



Facebook



X



Share via Email



Kemenkumham Sultra gelar Legal Expo sebagai upaya menghadirkan pelayanan optimal. Foto: istimewa

Dengarkan

**KENDARI, DETIKSULTRA.COM**– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Legal Expo sebagai wujud pelayanan prima terhadap masyarakat.

Legal Expo yang berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 3 hingga 4 Agustus 2024 di salah satu pusat perbelanjaan di Kendari merupakan layanan satu pintu yang diadakan oleh Kemenkumham Sultra dalam rangka peringatan Hari Pengayoman Ke-79.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenkumham Sultra melayani pelayanan publik seperti AHU, KI, serta Layanan Paspor. Legal Expo ini tidak hanya terfokus pada pelayanan publik, namun juga memamerkan hasil-hasil kerajinan warga binaan yang siap untuk dijual kepada masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sultra, Hidayat Yasin mengungkapkan, kegiatan ini sebagai wujud Kemenkumham Sultra dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Kegiatan ini sebagai wujud Kemenkumham Sultra untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ungkapnya, Sabtu (03/08/2024).

Salah satu pengunjung, Hasyim Abdul Rahim mengatakan, bahwa ia sangat antusias terhadap kegiatan seperti ini, karena menurutnya Legal Expo sangat mempermudah masyarakat yang tidak sempat untuk melakukan pengurusan pelayanan akibat kesibukan dalam pekerjaan.

“Saya sangat senang dengan kegiatan ini, sangat mempermudah saya dalam mengurus paspor karena saya hampir tidak punya waktu dalam mengurus hal ini,” ujarnya.

Dia berharap agar kedepannya kegiatan pelayanan publik satu pintu seperti ini dapat terus ditingkatkan agar semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Selain Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril turut hadir dalam memantau kegiatan Legal Expo Kemenkumham Sultra. (kjs)



Nasional

# Kemenkumham Launching Webinar Series dan Web E-Kompetensiku



Redaksi • 5 Agustus 2024

247

Share



Facebook



X



Share via Email



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna H Laoly. Foto: Istimewa

Dengarkan

DEPOK, DETIKSULTRA.COM- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna H Laoly hari ini secara resmi membuka kegiatan Webinar Series "Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM" sekaligus launching portal web E- Kompetensiku, Senin (05/08/2024). Kedua gagasan ini merupakan terobosan inovatif yang diprakarsai dan ditindaklanjuti bersama-sama oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, beserta jajaran, untuk meningkatkan kualitas pengembangan SDM ASN Kemenkumham di seluruh Indonesia. Diharapkan, gagasan ini dapat menjawab berbagai persoalan pengembangan kompetensi SDM ASN yang masih belum optimal serta memiliki berbagai keterbatasan.

Terdapat lima latar belakang yang mendasari keberadaan webinar series ini. Pertama, adanya amanat perundang-undangan tentang pengembangan kompetensi bagi ASN. Kedua, setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ketiga, setiap PNS memiliki hak pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Keempat, Skor Dimensi Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN masih perlu ditingkatkan agar lebih baik. Kelima, belum optimalnya implementasi corporate university di lingkungan Kemenkumham.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, BPSDM Hukum dan HAM juga meluncurkan inovasi lainnya, yaitu E-Kompetensiku. Saat ini, aplikasi penilaian kompetensi dan pelatihan berbasis pengembangan kompetensi masih belum terintegrasi dalam satu platform dan belum memberikan kemudahan dalam akses melalui satu domain.

Aplikasi ini berupaya menyelaraskan dan menghimpun seluruh layanan teknologi informasi penilaian kompetensi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM seperti rencana, jadwal, dan hasil pelaksanaan serta terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (dulu dikenal sebagai SIMPEG) di Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Pada kesempatan ini, hingga pukul 09.00 WIB, sebanyak kurang lebih 42.000 pegawai telah hadir, baik secara langsung maupun bergabung secara virtual.

Antusiasme yang besar ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM di lingkungan Kemenkumham. Selain itu, tingginya partisipasi juga mencerminkan komitmen para ASN untuk terus belajar dan berkembang, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan profesional.

Dalam sambutannya, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan, apresiasi kepada BPSDM Hukum dan HAM atas terobosan yang telah dilakukan. "Dengan adanya Webinar Series dan portal E-Kompetensiku, saya yakin kita dapat menciptakan SDM yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat global. Ini adalah langkah maju dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia," ujar Yasonna.

"Hari ini saya juga resmikan penggunaan Gedung Rektorat A Politeknik Pengayoman Indonesia dan Ground Breaking pembangunan Rektorat B yang Insya Allah akan selesai akhir tahun ini. Kita akan melanjutkan pembangunan asrama untuk Taruna/i pada tahun 2025," ungkapnya.

Momen bersejarah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Politeknik Pengayoman Indonesia.

Sementara Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, mengungkapkan kebanggaannya atas peluncuran inovasi ini.

"Kami berharap, dengan adanya webinar series, portal E-Kompetensiku, dan pedoman penyelenggaraan kompetensi berbasis corpu, seluruh ASN di Kemenkumham dapat terpenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi minimal sebanyak 20 JP sehingga percepatan implementasi corpu juga dapat berlangsung dengan optimal. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kemenkumham," ungkap Razilu.

Kegiatan webinar series ini akan berlangsung dalam delapan seri, masing-masing menghadirkan sesi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selain itu, akan mengundang narasumber ahli dan kompeten di bidangnya, yang siap berbagi pengetahuan dan pengalaman. Para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi secara efisien dan efektif, dengan fleksibilitas waktu dan biaya gratis. Materi yang disampaikan dapat diakses berulang kali, sehingga peserta dapat memaksimalkan pemahaman mereka. Selain itu, peserta juga akan menerima e-sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pengembangan kompetensi.

Dengan adanya webinar series, portal E-Kompetensiku, dan pedoman penyelenggaraan kompetensi berbasis corpu, diharapkan seluruh ASN Kemenkumham dapat terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka secara berkelanjutan. Kedua terobosan ini bukan hanya langkah maju dalam pengembangan SDM, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen Kemenkumham untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Melalui inovasi ini, diharapkan ASN Kemenkumham dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi lebih signifikan dalam membangun negara. Kemenkumham berkomitmen untuk terus berinovasi dan berusaha meningkatkan kualitas SDM demi mencapai visi dan misi organisasi serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik. (kjs)



Metro Kendari

# Kanwil Kemenkumham Sultra Ikuti Pembekalan Purnabakti, Pensiun Sehat dan Sejahtera



DetikSultra • 6 Agustus 2024

243

Share

Facebook

X

Share via Email



Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba dan jajaran Kanwil Sultra mengikuti pembekalan purnabakti, Selasa (06/08/2024). Foto: istimewa

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti pembukaan pembekalan purnabakti secara daring di aula kantor wilayah, Selasa (06/08/2024).

Kegiatan dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hidayat, Kepala Divisi Keimigrasian, Sjachril beserta jajaran Kanwil Sultra dan juga hadir calon purnabakti unit pelaksana teknis dan keimigrasian dalam Kota Kendari.



Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengantarkan dan menyiapkan purnabakti ASN Kementerian Hukum dan HAM yang mandiri dan berdedikasi tinggi serta menyiapkan purnabakti yang sehat, bahagia dan Sejahtera.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Min Usihen, membuka secara resmi Pembekalan Purnabakti dengan tema "Pensiun Sehat, Bahagia dan Sejahtera".

Dalam sambutannya Min Usihen menyampaikan pesan Sekretaris Jenderal, Andap Budhi Revianto, kepada 1180 calon purnabakti bahwa pensiun dari pekerjaan, tetapi tidak pensiun dari dinamika kehidupan. Ini adalah kesempatan untuk mendesain ulang menuju kehidupan yang baru apakah akan tetap sama ataupun berbeda dan kemungkinan menjadi luar biasa.

"Yang terpenting dari semua itu saat pensiun harus tetap sehat wal afiat," ungkapnya.

Selanjutnya Min Usihen mengatakan, purnabakti bukanlah selesai dari segala sesuatunya, yang memasuki purnabakti harus terus melanjutkan pengabdian tetapi pada medan tugas yang berbeda yakni melaksanakan pengabdian baru di tengah-tengah masyarakat.

Purnabakti bukanlah akhir masa pengabdian seorang ASN kepada bangsa dan negaranya, tetapi pensiun merupakan suatu kehormatan dalam bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara kepada setiap pegawai ASN yang telah mengabdikan kepada Negara dan Bangsa dan juga masyarakat.

"Saya mewakili Pimpinan Tinggi di Kementerian Hukum dan HAM mulai dari Bapak Menteri, para Dirjen, para Kepala Badan Staf Ahli, Staf Khusus dan seluruh jajaran ASN Kementerian mengucapkan terimakasih atas kontribusi terbaik dari Bapak Ibu sekalian selama mengabdikan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia," tutupnya. (kjs)

Nasional

# Kemenkumham Kukuhkan Organisasi Profesi Analis Hukum



DetikSultra • 8 Agustus 2024

248

Share



Facebook



X



Share via Email



Menkumham RI, Yasonna Laoly. Foto: istimewa

Dengarkan

JAKARTA, DETIKSULTRA.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selalu berkomitmen membangun kesadaran hukum di masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia di bidang hukum, dengan menginisiasi pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum, dan mengukuhkan organisasi Persatuan Analis Hukum Indonesia (Persahi).

Dengan hadirnya jabatan fungsional dan wadah organisasi analis hukum, diharapkan mampu membawa dan menjunjung tinggi wibawa hukum di tengah masyarakat sebagai dasar perekat bangsa.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menghadiri rapat koordinasi teknis jabatan fungsional analis hukum, sekaligus mengukuhkan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum Persahi di Jakarta, Rabu (07/08/2024).

“Kinerja dari seorang analis hukum merupakan salah satu upaya untuk membangun dan mengembalikan wibawa hukum di tengah tengah masyarakat,” tegas Yasonna.

Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku instansi pembina teknis jabatan fungsional analis hukum membentuk Persatuan Analis Hukum Indonesia (PERSAHI) sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi sekaligus gagasan yang membangun bagi pengembangan analis hukum ke depan.

Organisasi profesi ini akan menjadi mitra Kemenkumham dalam melakukan pembinaan analis hukum di berbagai bidang, dengan mengusung visi yang sama yaitu membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ber-AKHLAK (berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif).

Permasalahan di bidang hukum merupakan permasalahan yang sering timbul dan juga kompleks, yang tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga melibatkan institusi pemerintahan yang merupakan bagian dari interaksi sosial kehidupan bernegara.

“Hal ini tentu membutuhkan peran dan kerja seorang analis hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di sebuah institusi pemerintahan,” jelas Yasonna.

Jabatan Analis Hukum hadir sebagai alternatif pilihan jabatan dalam rumpun hukum dan peradilan yang bersifat terbuka. Dengan jumlah anggota 1.664 orang yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Menkumham optimis PERSAHI mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pembangunan hukum ke depan.

“Karena Persahi ditopang dengan aparatur yang bekerja secara profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang terarah dan terukur,” terang Yasonna.

Organisasi profesi ini, punya peran besar untuk membuat analis hukum menjadi lebih terpendang. Pengurus pusat harus memiliki visi ke mana organisasi ini akan dibawa ke depan. Ia berpesan agar organisasi ini terus memberikan penguatan, membagikan informasi, mengadakan pertemuan, serta mengundang narasumber/pakar-pakar yang mumpuni untuk menambah pengetahuan analis hukum.

Yasona mengharapkan pembentukan organisasi profesi ini menjadi modal dasar untuk mewujudkan pembangunan hukum ke depan yang ditopang dengan aparatur yang bekerja secara profesional, berintegritas, serta memiliki kompetensi yang terarah dan terukur.



“Saya ucapkan selamat atas kolaborasi dan konsolidasi di antara seluruh pihak sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kita harapkan organisasi ini menjadi yang solid dan memberikan kontribusi yang baik dalam mengorganisir Analis Hukum,” imbuh Yasonna.

Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana mengatakan, bahwa instansinya telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendorong terbentuknya Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum, mulai dari penyusunan kajian awal pembentukan, melakukan pembahasan bentuk organisasi dan struktur kepengurusan, pemilihan nama organisasi, lambang organisasi, serta perumusan visi dan misi.

“Pada 29 Juli lalu, BPHN juga telah melakukan pemungutan suara terhadap formatur pengurus pusat,” terang Widodo.

Yeni Rosdianti dari Biro Hukum Pemprov. DKI Jakarta terpilih sebagai Ketua Umum. V. Andri Hananto dari Kementerian Sekretariat Negara terpilih sebagai Sekretaris Umum. Kemudian, Muh. Najib dari Badan Pemeriksa Keuangan akan bertanggung jawab sebagai Bendahara Umum.

---

Selain itu, telah ditetapkan juga tiga dewan pengawas, empat koordinator, dan lima ketua bidang organisasi profesi. Widodo berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari penguatan peran Analis Hukum untuk berkontribusi kepada pembangunan hukum nasional ke arah yang lebih baik.

Jabatan Fungsional Analis Hukum dibentuk pada tahun 2020 melalui Peraturan Menteri PAN-RB No. 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum. Dengan sebaran 1664 orang analis hukum di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah saat ini. (kjs)

Metro Kendari

# Peringati Hari Pengayoman ke-79, Kanwil Kemenkumham Sultra Tabur Bunga di TMP Watubangga



DetikSultra • 9 Agustus 2024

241

Share

Facebook

X

Share via Email



Kakanwil Kemenkumham, Silvester Silj Laba pimpin upacara tabur bunga di TMP Watubangga, Jumat (09/08/2024). Foto: istimewa

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM– Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Watubangga Kota Kendari, Jumat (09/08/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-79 pada 19 Agustus 2024 mendatang.

Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Silvester Sili Laba memimpin langsung upacara tersebut. Turut hadir juga Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Hidayat Yasin pada kegiatan ziarah makam dan upacara tabur bunga tersebut.

Kegiatan ini diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kota Kendari baik UPT Pemasyarakatan maupun UPT Keimigrasian. Turut hadir juga Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (Pipas) serta perwakilan Dharma Wanita Persatuan Kanwil maupun masing masing UPT.

Kegiatan ini diawali dengan penghormatan kepada para arwah pahlawan yang dipimpin langsung oleh Kakanwil serta mengheningkan cipta atas jasa para pahlawan yang gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Upacara, ziarah, dan peletakan karangan bunga pada tugu makam pahlawan sebagai simbol penghargaan dan penghormatan ASN Kemenkumham kepada pahlawan Bangsa Indonesia guna menanamkan nilai-nilai juang dan kerja keras bagi generasi penerus bangsa serta dilanjutkan dengan tabur bunga di atas pusara makam para pejuang bangsa,” ungkap Silvester.

Kakanwil juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pengayoman Ke 79 Tahun 2024, sebagai informasi bahwa Kanwil Kemenkumham Sultra juga telah melaksanakan Kegiatan Legal Expo, Aksi Donor Darah, serta berbagai macam perlombaan olahraga. (kjs)



Metro Kendari

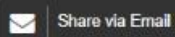
# Kemenkumham Sultra Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan, Semarakkan Peringatan Hari Pengayoman ke-79



Redaksi • 15 Agustus 2024

👁 238

🔗 Share



📷 Kemenkumham Sultra berbagi kebahagiaan di panti asuhan, semarakkan peringatan Hari Pengayoman ke-79. Foto: Istimewa.

▶ Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama UPT Se-Kota Kendari menggelar kegiatan bakti sosial yang bertemakan Kumham Peduli, Kumham Berbagi di beberapa Panti Asuhan dan Yayasan di Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-79, Kamis (15/08/2024).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Administrasi, Sunu Tedy Maranto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Bambang Haryanto, Kepala Divisi, Keimigrasian Sjachril dan seluruh Kepala UPT se-Kota Kendari.

---

Dalam sambutannya Silvester mengungkapkan, hari pengayoman adalah momentum penting bagi Kemenkumham Sultra untuk merefleksikan komitmen dalam melayani dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Melalui bakti sosial ini, kami ingin memberikan dukungan nyata anak-anak panti asuhan yang membutuhkan," tuturnya.

Dirinya berharap kegiatan ini dapat meringankan beban anak-anak panti dan meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban saudara-saudara kita di Yayasan Panti Asuhan Semi Metta Bahagia," ujarnya.

Untuk diketahui, kegiatan dimulai di titik kumpul Kanwil Kemenkumham Sultra dan kemudian tim dibagi menjadi dua, dimana tim I dikoordinatori oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Musba Bakrie. Kemudian tim II dikoordinatori oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Satmawati.

Pada kegiatan Bakti Sosial ini dilaksanakan di delapan panti asuhan dan yayasan yang berbeda diantaranya, Yayasan Pondok Pesantren Darul Muhlisin, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Pondok Pesantren Mushulul Fawwaz, Yayasan Pondok Pesantren Sohibbul Qur'an, Yayasan Pondok Pesantren hidayatullah, Sultan al amin, Yayasan YPI Nurul Maghfirah, dan Yayasan Al Ikhlas.

Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai Kemenkumham dan masyarakat. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan pemberian secara simbolis sembako dan bantuan lainnya. (kerjasama)

Metro Kendari

# Kakanwil Kemenkumham Sultra Sebut Rasio Jumlah Petugas dan Warga Binaan Tidak Seimbang



DetikSultra • 17 Agustus 2024

255

Share



Facebook



X



Share via Email



Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba saat menyampaikan laporan di peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Lapas Kelas IIA Kendari, Sabtu (17/08/2024). Foto: istimewa

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) Silvester Sili Laba dalam peringatan HUT ke-79 RI melaporkan ketidakseimbangan antara jumlah petugas pengamanan yang ada dengan jumlah warga binaan masyarakat.

Dalam laporannya Silvester menyampaikan, saat ini terdapat ketidakseimbangan antara jumlah petugas pengamanan yang ada dengan jumlah warga binaan masyarakat, dengan rata-rata rasio jumlah petugas pengamanan dengan warga binaan masyarakat sebesar 1:60.



"Selain itu, jumlah WBP sangat melebihi kapasitas yang ada, dengan total persentase overload mencapai 112%," tuturnya pada peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Lapas Kelas IIA Kendari, Sabtu (17/08/2024).

Hal ini menunjukkan indikasi kerawanan yang mana sangat mempengaruhi dalam proses penjagaan dan pembinaan, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.

Namun pihaknya selalu berusaha untuk meminimalisir potensi kerawanan melalui langkah-langkah yang dilakukan secara intensif dengan berbagai pendekatan.

Seperti, melakukan pembinaan dan pengendalian secara terus menerus melalui evaluasi dan pengawasan pada apel bersama yang dilakukan dengan duduk setiap pagi dengan seluruh jajaran se-Sulawesi Tenggara baik Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, dengan selalu mengglorifikasikan salam Pancasila dan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertebal nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian yang merupakan wujud dari corporate university sekaligus evaluasi kinerja.

"Kami juga menginisiasi pengawasan dan pengendalian melalui aplikasi Sistem Laporan Informasi Layanan Berbasis Aplikasi (SILILABA) secara real time cepat dan profesional atas seluruh pelaksanaan tugas setiap harinya khusus untuk jajaran Kemenkumham Sultra baik kantor wilayah maupun unit pelaksana teknis," terangnya.

Inovasi SILILABA ini sebagai tindak lanjut, arahan dan petunjuk dari Sekjen Kemenkumham yang sekarang sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto yang selalu memastikan organisasi berjalan on track secara optimal, tidak auto pilot, terukur dan profesional pada setiap kesempatan. Misalnya setiap hari Jumat melaksanakan olahraga bersama seluruh Indonesia dan terpusat, yang dipandu langsung oleh pusat, dan arahan kebijakan strategis lainnya dalam pelaksanaan tugas.

Melakukan mutasi maupun rotasi kepada pejabat eselon v dan pegawai unit pelaksana teknis sebagai bentuk penyegaran dan meminimalisir risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Harapannya melalui langkah-langkah tersebut kami dapat meminimalisir potensi kerawanan yang ada dalam lapas dan Rutan dengan memberikan penguatan, serta diharapkan pembinaan dapat diberikan dengan baik dan sepenuh hati agar warga binaan yang keluar dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya," harap Sivester.

Pihaknya pun terus berkomitmen melakukan pendekatan humanis dengan pembinaan dan pengendalian misalnya makan bersama warga binaan menggunakan nasi ompreng untuk memastikan kualitas makanan sesuai dengan SOP.

"Selain itu, kami turut menekankan pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada seluruh jajaran insan pengayoman Sultra sesuai dengan peraturan yang berlaku," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen Kemenkumham yang juga Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto mengatakan, dengan diberlakukannya undang-undang pemasyarakatan yang baru yakni undang-undang nomor 22 tahun 2022 diharapkan dapat mengurangi masalah klasik di lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas penghuni pada Lapas maupun Rutan di seluruh Indonesia.

"Saya juga mengapresiasi kerja keras jajaran kemasyarakatan baik pusat dan tingkat daerah yang senantiasa memegang teguh integritas dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi walau dengan keterbatasan dalam mewujudkan pelayanan yang optimal," katanya mengakhiri. (bds)

**Reporter: Septiana Syam**

**Editor: Biyan**

---

Metro Kendari

# Sekjen Kemenkumham RI Imbau Jajarannya Tidak Terlibat Praktek Narkoba dan Pungli



DetikSultra · 17 Agustus 2024

249

Share

Facebook

X

Share via Email



Sekjen Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto saat memberi pengarahan, Sabtu (17/08/2024). Foto: istimewa

Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) RI, Andap Budhi Revianto dalam momen HUT Kemerdekaan ke-79 RI, menghimbau kepada seluruh jajaran insan pengayoman untuk tidak terlibat dalam praktek peredaran narkoba dan pungutan liar (Pungli).

Andap yang menghadiri langsung upacara HUT ke-79 RI dan dirangkaikan dengan pemberian remisi kepada warga binaan se Sulawesi Tenggara (Sultra) di Lapas Kelas IIA Kendari dalam sambutannya menegaskan, kepada seluruh jajaran Kemenkumham RI tidak terkecuali di Sultra untuk tidak terlibat dalam praktek peredaran narkoba dan pungli baik itu di Lapas, Rutan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).



"Diharapkan kepada insan pengayoman untuk tidak mencederai prestasi yang sudah kita capai selama ini," jelasnya, Sabtu (17/08/2024).

Dia mengatakan, tidak ada toleransi bagi praktek-praktek penyimpangan seperti kedua hal tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Andap juga berpesan kepada warga binaan untuk berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan serta terus mengembangkan potensi diri dan mematuhi tata tertib di Lapas, Rutan dan LPKA sehingga menjadi bekal mental positif ketika nanti kembali ke masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba menuturkan, sebagaimana pesan Sekjen Kemenkumham RI agar selalu hati-hati narkoba.

"Kita pun terus menghimbau agar hati insan pengayoman untuk hati-hati dengan narkoba dan jauhi praktek pungli," tuturnya.

Pihaknya pun selalu mengedepankan pelayanan yang humanis dan sepenuh hati kepada warga binaan. (bds)

**Reporter: Septiana Syam**

**Editor: Biyan**

Nasional

# Kemenkumham Garda Terdepan Menjaga Hukum dan Hak Asasi Manusia



DetikSultra • 18 Agustus 2024

234

Share



Facebook



X



Share via Email



Menkumham RI, Yasonna Laoly. Foto: istimewa

Dengarkan

JAKARTA, DETIKSULTRA.COM – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada Upacara Peringatan Kemerdekaan RI ke-79 menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia.

Untuk itu, Kemenkumham harus berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga hukum dan hak asasi manusia.

Yasonna mengatakan, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan hukum dan hak asasi manusia, Kemenkumham memiliki peran yang sangat strategis. Tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga hukum dan hak asasi manusia.

“Untuk menciptakan Indonesia yang maju dan berkeadilan, Kemenkumham harus siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Yasonna di Lapangan Upacara Kemenkumham di Jakarta, Sabtu (17/08/2024).

Dia menambahkan, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk bekerja lebih keras lagi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif.

“Mari kita garap segala potensi yang ada, jangan ada waktu yang terbuang sia-sia,” tegasnya.

Selain itu, dalam sambutannya Yasonna juga menyampaikan, kepada seluruh pegawai untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan hukum dan HAM.

Semua komponen masyarakat, baik lembaga pemerintah, swasta memiliki peran penting dalam membangun ekosistem hukum yang mendukung pertumbuhan tersebut.

“Kita memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat agar visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pegawai Kemenkumham untuk menyatukan langkah menuju visi yang lebih besar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya makmur secara materiil, tetapi juga kaya akan budi pekerti dan nilai-nilai luhur.

“Mari kita terus berinovasi, beradaptasi, dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Seperti dikatakan oleh bapak proklamator kita, bergandeng tangan untuk menuju masa depan yang lebih baik,” tegas Yasonna.

Pada hari Kemerdekaan RI ke-79 ini, pemerintah juga memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum kepada 176.984 orang narapidana, yang terdiri dari 175.728 orang narapidana umum dan 1.256 orang anak binaan.

Menurut Yasonna, remisi ini bukan sekadar pengurangan hukuman, remisi adalah langkah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat setelah menjalani hukuman.

“Remisi adalah bentuk perhatian dan humanisme negara terhadap mereka yang sedang menjalani hukuman. Ini adalah wujud komitmen kita terhadap rehabilitasi, terhadap pemulihan, dan terhadap harapan baru bagi semua,” pungkasnya. (kjs)

Metro Kendari

# Kanwil Kemenkumham Sultra Peringati Hari Pengayoman ke-79



DetikSultra · 19 Agustus 2024

242

Share



Facebook



X



Share via Email



Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba memimpin upacara dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 di pelataran Kanwil Kemenkumham Sultra, Senin (19/08/2024). Foto: istimewa

Dengarkan

**KENDARI, DETIKSULTRA.COM** – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79. Upacara dipimpin langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba.

Dalam sambutannya, Silvester mengungkapkan, pada hari yang spesial ini, Kemenkumham berkomitmen menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



"Kita pun terus berupaya untuk memperluas program edukasi dan konsultasi hukum, agar masyarakat tidak hanya jadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan keadilan," katanya, Senin (19/08/2024).

Kemenkumham harus beradaptasi dengan perkembangan zaman termasuk memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung upaya penegakan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Sebagai insan pengayoman tugas kita bukan hanya sekedar menjalankan peraturan tetapi juga kita memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat," tuturnya.

Silvester menekankan kepada insan pengayoman untuk meningkatkan pelayanan yang benar-benar berdampak kepada masyarakat serta merapatkan barisan menuju Indonesia Emas 2045 dan meneguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan. (bds)

**Reporter: Septiana Syam**

**Editor: Biyan**

Nasional

# Terima Jabatan Menkumham, Supratman Minta Kolaborasi Seluruh Jajaran Kemenkumham



DetikSultra • 21 Agustus 2024

240

Share



Facebook



X



Share via Email



Serah terima jabatan (Sertijab) oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Supratman Andi Agtas. Foto: istimewa

Dengarkan

JAKARTA, DETIKSULTRA.COM – Supratman Andi Agtas melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Hukum dan HAM bersama Yasonna H. Laoly, Selasa (20/8/2024). Sertijab dilakukan setelah Supratman dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan ini, Supratman meminta kepada segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik. Ia tidak ingin ada perpecahan di dalam Kemenkumham karena pergantian pimpinan.

"Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan," ujarnya saat acara sertijab di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham.

Mantan anggota DPR ini mengatakan akan melanjutkan seluruh capaian yang telah diraih Kemenkumham pada era Yasonna. Menurutnya, pimpinan dapat berganti, tetapi kinerja harus tetap berkelanjutan.

"Seluruh jajaran Kemenkumham, saya berharap apa yang dicapai oleh Yasonna mari kita lanjutkan. Yang kurang kita perbaiki," tuturnya.

Ia mengaku dititipkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang di Parlemen. Salah satunya, UU tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia.

"UU ini menjadi perhatian. Saya harapkan Kepala BPHN dan Dirjen PP untuk berkomunikasi bersama Parlemen, baik di Komisi VI maupun Badan Legislasi," pinta Supratman.

Sementara itu Yasonna Laoly, pada momen yang sama, mengungkapkan terima kasihnya kepada seluruh jajaran Kemenkumham. Bagi dia, seluruh catatan baik Kemenkumham berhasil didapatkan karena kekompakan dan kerja sama.

"Tidak mungkin menteri bekerja sendiri. Kekompakan dan kebersamaan kita telah mengukir catatan-catatan baik selama saya memimpin kementerian ini. Terima kasih untuk kerja keras dan dukungannya," ungkap Yasonna.

Menkumham periode 2014-2024 ini mengajak jajaran Kemenkumham, mulai dari pimpinan tinggi hingga pegawai, untuk memberikan dukungan kepada Supratman sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru.

Adapun Supratman adalah politisi asal Sulawesi Tengah. Sebelum menjadi Menteri Hukum dan HAM, pria kelahiran 28 September 1969 ini memiliki pengalaman sebagai seorang advokat, akademisi, dan politikus. Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM pada 19 Agustus 2024. (kjs)

Metro Kendari

# Kanwil Kemenkumham Sultra Sebut Ada Peningkatan Pendaftaran Pencatatan Kekayaan Intelektual



DetikSultra • 29 Agustus 2024

237

Share



Facebook



X



Share via Email



Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba. Fotoistimewa

► Dengarkan

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic atau klinik kekayaan intelektual menyebutkan terdapat peningkatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual dari tahun ke tahun.



Kepala Kanwil Kemenkumham, Silvester Sili Laba memaparkan, pada tahun 2020 tercatat 265 hak cipta, 29 hak paten dan paten sederhana, 2021 ada 561 hak cipta dan 27 paten dan paten sederhana, 2022 sebanyak 812 hak cipta dan 22 paten dan paten sederhana.

Selanjutnya 2023 ada 1.138 hak cipta dan 21 paten dan paten sederhana. Adapun di 19 Agustus 2024 sebanyak 586 hak cipta dan 19 hak paten dan paten sederhana sudah tercatat.

"Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan perguruan tinggi," katanya dalam seremoni Mobile Intellectual Clinic (MIC) 2024, Rabu (28/08/2024) malam.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi dan pelayanan di hampir seluruh Provinsi Sultra terkait edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di berbagai daerah di Sultra sejak 2021.

Mobile Intellectual Property Clinic memang diperlukan untuk mendorong tumbuh kembang iklim kekayaan intelektual Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas permohonan. Harapannya, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Khusus untuk pendaftaran merek pelaku UMKM di 2024 ini pihaknya mendapat dukungan dari banyak pihak seperti Pemda Sultra melalui Dinas Pariwisata yang memfasilitasi pembiayaan 55 pendaftaran merek pelaku UMKM, Kadin Sultra sebanyak 40 merek dan Rumah BUMN Muna 15 pelaku UMKM.

Selanjutnya perwakilan BI Sultra melalui sinergi dan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi tentang kekayaan intelektual dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia dan onboarding UMKM Sultra yang ditindaklanjuti oleh pelaku UMKM dengan pendaftaran merek. Serta Dinas Koperasi dan UMKM Sultra melalui kegiatan layanan bantuan hukum pelaku UMKM yang diisi dengan kegiatan edukasi dan pendaftaran merek.

"Atas dukungan tersebut angka pendaftaran merek di Sultra meningkat setiap tahunnya," tutur Silvester.

Dalam kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Sultra juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi di Sultra. (kjs)